

emosional. Atau lebih dikenal dengan periode transisi, dimana dunia anak mengalami kegoncangan. Di masa-masa ini siswa menemui banyak kesulitan seputar adaptasi, baik penyesuaian terhadap guru, teman, lingkungan sekolah maupun pelajaran dan sebagainya.

Sementara masyarakat secara umum maju terus perkembangannya seiring dengan kepintaran manusia. Bahkan perkembangan ilmu dan teknologi ilmu dan teknologi serta perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan deras dewasa ini, telah memberikan tantangan baru kepada setiap individu. Setiap individu senantiasa ditantang untuk senantiasa ditantang untuk terus selalu belajar untuk selalu dapat menyesuaikan diri sebaik-baiknya. Hal demikian secara eksplisit atau implisit berbalik menekan manusia dan lembaga sekolah dengan beban tambahan sehingga peranan guru semakin meningkat, dari sebagai pengajar menjadi pembimbing.

Lalu bagaimana dengan realitanya, menjadi efektifkah proses belajar mengajar apabila tugas utama seorang guru sebagai tenaga pengajar harus merangkap sebagai pembimbing, sedangkan keahlian untuk membimbing tidak dimilikinya. Maka solusi terbaik adalah dibentuknya bidang khusus yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut, untuk menjawab tantangan beserta

kesulitan yang tengah melanda mereka (siswa) agar dapat berkembang seoptimal mungkin sejalan dengan taraf perkembangan dan potensinya.

Dengan realita yang ada di hadapan kita, sudah seyogyanya setiap lembaga pendidikan memperhatikan dan mengaktualisasikan serta memprioritaskan eksistensi bidang tersebut, dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Dan secara serempak di setiap jenjang pendidikan sekolah, bidang bimbingan dan konseling telah mewarnai dengan segenap ciri khas yang dimilikinya, yang nota benanya memberikan layanan / bantuan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.

Menyadari betapa urgensinya jasa layanan bimbingan dan konseling terhadap kelancaran proses belajar mengajar, hal ini menarik untuk kita kaji lebih mendalam melalui studi riset dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tepatnya di SLTPN I Lamongan, SLTPN II Lamongan dan SLTPN II Karangbinangun Lamongan (SLTPN Kabupaten Lamongan) dengan suatu harapan hal ini dapat dijadikan sebagai acuan mengkonfirmasi kebenaran akan perlunya kehadiran program bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah.

demikian, struktur organisasi bimbingan dan konseling di seluruh SLTP secara garis besar adalah sama yakni, mengacu pada tatanan kurikulum 1994. Meskipun tidak menutup kemungkinan pola organisasi bimbingan dan konseling yang digunakan suatu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Hal ini dapat terjadi karena situasi dan kondisi antara sekolah yang satu dengan yang lain tidak sama. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan pola organisasi bimbingan dan konseling suatu sekolah.

Yang jelas, menurut analisa penulis, secara umum pola/struktur organisasi bimbingan dan konseling di masing-masing lembaga tetap bertumpu pada kurikulum yang ada. Perbedaan pola yang bervariasi dimaksudkan untuk mempermudah jalannya bimbingan dan konseling dalam rangka menstabilkan dan memantapkan hasil usaha tersebut. Kiranya hal itu dapat diperdebatkan, sebab organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, didalamnya terdapat sejumlah aktivitas, unsur-unsur pelaksana dan keperluan-keperluan untuk melaksanakannya. Organisasi yang baik itu penting, tapi yang lebih penting bagaimana cara kita untuk dapat mewujudkan organisasi itu menjadi baik dan efektif sebagaimana direncanakan.

2. Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling

Sarana dan prasarana yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun untuk keperluan ini perlu diprogramkan sebelum tahun ajaran baru agar pelayanan bimbingan dapat berjalan dengan lancar. Terlepas dari itu, ketentuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang layanan bimbingan, diantaranya ialah; alat pengumpul data, perlengkapan teknis dan perlengkapan administratif serta tak terkecuali ruang bimbingan dan anggaran biaya. Kesemua alat tersebut sangat berperan dan menentukan hasil akhir layanan bimbingan.

Bertolak dari hasil observasi penulis, ternyata di lokasi penelitian masih ditemukan adanya kesenjangan (diskrepensi) cukup serius, terlebih di SLTPN II Karangbinangun Lamongan yang dirasa sangat kekurangan. Mengingat lembaga tersebut relatif baru didirikan, terhitung tiga tahun berjalan, juga karena letak geografisnya yang kurang strategis, sulit terjangkau transportasi (apalagi musim hujan) yang berimplikasi pada kedisiplinan, dan wilayah sekitar SLTP yang masuk kategori daerah IDT, serta masih banyak lagi dalih lain yang diperkuat minusnya fasilitas yang dimiliki SLTP II Karangbinangun Lamongan, ringkasnya faktor finansiallah yang lebih mendominasi disamping faktor lain yang tetap berpengaruh.

Berbeda halnya dengan dua SLTP (SLTPN I dan II Lamongan), yang mempunyai fasilitas cukup lengkap untuk menunjang pelayanan bimbingan. Meskipun dalam prasarana (ruang bimbingan) ketiganya bisa dikatakan belum memadai, apabila diidentikkan dengan ketentuan idealnya. Akan tetapi keadaan demikian patut dibanggakan, karena ruang bimbingan sudah independen tidak mendompleng, sehingga suasana bimbingan dapat tercipta secara fair dan terbuka tanpa ada perasaan takut untuk didengar maupun dilihat orang lain.

Berangkat dari data diatas, penulis dapat menjabarkan bahwa, fasilitas yang tersedia di tiga SLTPN masih menemui banyak kekurangan terutama SLTPN II Karangbinangun. Sementara elemen tersebut ikut serta mengukir keberhasilan layanan bimbingan. Agar intensifikasi dapat termanifestasi, kelengkapan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling secermat mungkin diperhatikan dan dipenuhi, dengan begitu layanan bimbingan tetap berporos pada tujuan yang telah digariskan.

3. Keadaan Petugas Bimbingan dan Konseling

Sesuai dengan ketentuan surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 0433/P/1993 dan nomor : 25 1993, diharapkan pada setiap sekolah ada petugas yang melaksanakan

layanan bimbingan yaitu guru pembimbing / konselor dengan rasio satu orang guru pembimbing/konselor untuk 150 orang siswa.

Untuk mengetahui relevansi antara keputusan tertulis dengan realita di lapangan, penulis akan memaparkan susunan nama-nama staf ahli bimbingan di wilayah penelitian, sebagai berikut :

No	Nama	SLTPN	Status	Ijasah	Jabatan
1	Drs. Marduni	I Lmg	PN	S1 IKIP	Kep. Sek. + Penanggung jawab
2	Sri Hastuti BA	I Lmg	PN	S1 IKIP	Koordinator Bimbingan dan Konseling
3	Retno Chusnul C. SPd	I Lmg	PN	S1 IKIP	Guru Pembimbing
4	Sri Iktiarni	I Lmg	GTT	D3 IKIP	Administrasi Bimbingan dan Konseling
5	Drs. Moh. Kamil	II Lmg	PN	S1 IKIP	Kepala Sekolah + Penanggung jawab
6	Dra. Sri Istutanti	II Lmg	PN	S1 IKIP	Koordinator Bimbingan dan Konseling
7	Subandu Raharjo	II Lmg	PN	D2 PGS LP	Guru Bimbingan dan Konseling

siswa sebagaimana ketentuan masih belum mendapat jaminan keefektifannya dalam menjalankan misi yang dipikulnya. Apalagi dengan jumlah yang begitu besar. Sedangkan satu sisi konselor memiliki keterbatasan kemampuan yang tidak bisa dipaksakan di luar batas kemampuannya.

Mencermati faktor konkret ini, dibutuhkan langkah cepat dan tepat. Sebagaimana ungkapan yang dipaparkan koordinator bimbingan dan konseling SLTPN II Karangbinangun Lamongan Ismu'nali SPd. bahwa, "Sebenarnya pihak sekolah menghendaki kehadiran tenaga bimbingan dan konseling baru, namun kendalanya adalah dana."

Sedangkan menurut koordinator bimbingan dan konseling Sri Hastuti, BA. dan Dra. Sri Insutanti bahwa; "pihak sekolah telah berupaya membuka lowongan untuk merekrut petugas bimbingan dan konseling tambahan, tapi dari para pelamar dirasakan belum ada yang memadai, terpaksa usaha itu tidak sampai terealisasi."

Dengan berorientasi pada data mentah yang dihasilkan dari studi riset, dimana secara mayoritas lembaga pendidikan di Lamongan khususnya, menemui berbagai kesenjangan dan hambatan-hambatan dalam upaya mengoperasionalkan program layanan bimbingan. Menurut penulis, hendaknya pihak sekolah mencari kebijaksanaan sesegera mungkin untuk menghindari

kemungkinan buruk yang akan terjadi, bila persoalan tersebut tidak ingin dibiarkan berlarut-larut. Dengan harapan petugas bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan bimbingan secara optimal sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan utama bimbingan dan konseling.

4. Program-program Bimbingan dan Konseling

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terpadu dan tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan.

Dan untuk dapat memahami fungsi bimbingan tersebut, perlu diperhatikan pembagian program / bidang bimbingan itu sendiri yang meliputi ; bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier. Dengan maksud agar tidak terjadi kekaburan atau pencampuradukan misi dan fungsi yang diembannya.

Dari keempat klasifikasi itu, ternyata yang mendapat prioritas di jenjang SLTP adalah bimbingan pribadi-sosial dan belajar. Sedangkan untuk bimbingan karier lebih ditekankan pada SLTP kejuruan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Andi Mapiere dalam bukunya "Pengantar Bimbingan Konseling di Sekolah", dan pada kenyataannya memang real adanya. Sebagaimana juga yang didapati di lapangan lokasi penelitian penulis. Dimana yang mendapat perhatian intensif itu adalah bimbingan belajar,

disamping bimbingan pribadi-sosial. Namun bukan berarti bimbingan karier tidak diprioritas sama sekali di lingkungan SLTP umum khususnya sebab secara operasional, setiap program bimbingan memiliki alokasi waktu dan sejumlah kegiatan terprogram yang telah disepakati dan termuat dalam hasil MGP (Musyawarah Guru Pembimbing) tahun 1998-1999, baik program tahunan maupun catur wulan.

Selanjutnya pola yang digunakan dalam melaksanakan program bimbingan dan knseling tersebut adalah pola 17 yang diuraikan dalam bentuk skematik berikut ini :

Berdasar pada hasil wawancara penulis dengan koordinator bimbingan dan konseling Dra. Sri Insutanti, Sri Hastuti BA. Dan Ismu'anah S.Pd. "akibat belum terealisasinya program bimbingan dan konseling disebabkan banyaknya hambatan-hambatan, diantaranya : kurangnya tenaga bimbingan dan konseling, fasilitas bimbingan dan konseling belum memadai, minusnya pengetahuan dan pengalaman bimbingan dan konseling dikarenakan background pendidikan yang tidak relevan, keterbatasan waktu yang dialokasikan dan sebagainya."

Akan tetapi pada dasarnya pelaksanaan program bimbingan dan konseling atau peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan itu setiap periode memperoleh peningkatan kuantitas maupun kualitas, walaupun dalam taraf rendah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya prestasi belajar yang dicapai siswa baik dari nilai raport ataupun NEM yang secara stabil grafitasi ketercapaian prestasi naik. Juga dapat dilihat dari sikap dan cara berfikir mereka yang cenderung semakin kritis dan matang dalam menatap kehidupan terutama masa depannya.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa program bimbingan dan konseling yang ditentukan dalam MGP tidak/masih belum dapat terealisasi secara integral. Konsekwensinya hasil klimaks dari layanan bimbingan belum dapat dirasakan secara penuh terutama

yang dapat dijadikan indikasi adanya kesulitan belajar siswa SLTPN Lamongan sebagai berikut : dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai (dibawah rata-rata kelas atau tidak ada keseimbangan antara potensi yang dimiliki dengan hasil akhir yang diperoleh), sikap dan cara menyelesaikan tugas yang diberikan baik latihan soal dalam kelas maupun pekerjaan rumah, serta kelainan-kelainan dalam bertindak di luar kebiasaan, seperti suka membolos, melamun, mengganggu teman, tegang/takut dan sebagainya."

Melengkapi keduanya (teori dan fakta di lapangan) diatas, Burton memandang gejala indikator kesulitan siswa meliputi :

1. Siswa dikatakan gagal (mengalami kesulitan belajar) bila didalam waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu.
2. Apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya / yang diprediksikan (berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya, intelegensi, bakat).
3. Jika yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian siswa sesuai dengan pola organismiknya pada fase perkembangan tertentu.

belajar) baik karena tidak adanya relevansi antara IQ yang disandang dengan realita yang diraihinya, atau tidak adanya kesesuaian antara upaya yang dilakukan dengan hasil akhir yang dicapai. Ketertinggalan ia dalam beradaptasi dengan materi yang diberikan, sehingga diekspresikan dengan sikap dan tingkah laku yang kurang wajar. Dengan kata lain seorang siswa diprediksi mengalami kesulitan belajar, apabila ia tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu (berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan dalam TIK atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam program pelajaran time allowed dan atau tingkat perkembangannya).

Dalam hasil belajar, sudah barang tentu mencakup aspek-aspek substansial, material, fungsional - struktural, behavioral atau yang mencakup segi-segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan dalam batasan waktu yang dimaksud, dapat berarti satu periode pendidikan atau fase perkembangan, satu tingkat atau kelas tahun pelajaran, semester atau triwulan, mingguan bahkan jam pelajaran tertentu. Maka apabila ia / mereka tidak mampu mencapai segala sesuatu yang ditargetkan (dialokasikan) berarti ia mengalami kegagalan.

Sekarang yang menjadi permasalahan, dan memerlukan pemahaman setiap pendidik khususnya dan semua kalangan

C. Peranan Bimbingan dan Konseling dalam Proses Belajar Mengajar (Pemecahan Kesulitan Belajar)

Sekolah sebagai miniatur masyarakat memegang bermacam-macam siswa dengan latar belakang kepribadian yang berbeda. Mereka heterogen, sebab diantara mereka ada yang kaya dan miskin, bodoh dan pintar, yang suka patuh dan suka menantang, juga didalamnya terdapat anak-anak dari kondisi keluarga yang berbeda.

Karena distorsi background itulah, tugas guru dirasakan berat, apalagi menghadapi keadaan seperti saat ini, yang mana perkembangan orientasi baru terhadap proses belajar mengajar yang disertai berbagai inovasi dalam perkembangan pendidikan telah menimbulkan tantangan baru bagi guru untuk meningkatkan peranannya, yang semula hanya bertugas sebagai pengajar kemudian meningkat menjadi multi tugas termasuk sebagai pembimbing.

Agar para guru dapat memainkan perannya secara baik sebagai pembimbing, maka dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih luas ketimbang hanya sebagai pengajar. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus aktor utama, artinya di tangan gurulah terletak keberhasilan proses belajar mengajar (pengajaran). Untuk itu guru merupakan faktor yang sangat dominan dan figur sentral dalam menentukan kesuksesan pengajaran disamping faktor dan pihak lain

yang punya andil. Jadi dalam menjalankan tugas mulianya guru harus benar-benar memahami dan memiliki kompetensi dasar guna mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Memperbincangkan masalah belajar, memang menarik dan tiada akan pernah selesai untuk dibahas, karena belajar itu merupakan inti kegiatan pengajaran di sekolah, maka wajiblah siswa dibimbing agar tercapai tujuan belajarnya. Dalam hal ini yang bertugas adalah semua pihak sekolah yang terkait tanpa terkecuali, mustahil keberhasilan akan digapai jika hanya guru yang bergerak menunaikan tugas tanpa dukungan dan kerjasama dengan pihak lain yang sama-sama memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan anak didik. Terlebih lagi apabila ada masalah yang muncul yang dianggap sebagai benalu untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin tidak terwujud, dengan begitu pihak lain yang lebih profesional diharuskan memainkan peranan dan uluran tangannya (pembimbing) untuk menjadi partner kerja dalam rangka merealisasikan cita-cita bersama.

Dan untuk memberikan bantuan pelayanan bimbingan terhadap siswa dengan sebaik-baiknya, seluruh pihak terkait (guru mata pelajaran, pembimbing sekolah dan kepala sekolah serta lainnya) perlu memahami siswa baik secara individual maupun kelompok. Sedangkan untuk memahami siswa-siswa tersebut, data-data tentang siswa mutlak diperlukan, sebab dari diri siswa disamping adanya kesamaan juga ada

perbedaan-perbedaan secara individual, diantaranya berkaitan dengan, kecerdasan (IQ), kecakapan, hasil belajar (prestasi), bakat sikap, kebiasaan, pengetahuan/pengalaman, ciri-ciri jasmaniah, minat, cita-cita, kebutuhan, kepribadian, pola-pola dan tempo perkembangan serta latar belakang lingkungannya.

Data-data diatas akan besar sekali manfaatnya dan menentukan usaha bantuan layanan bimbingan yang harus diberikan kepada siswa sesuai dengan kabutuhan-kebutuhannya, jika data tidak terkumpul dan terseleksi dengan akurat maka bisa jadi hasil yang dicapai sifatnya semu (kabur).

Aktifitas ini bukanlah mudah dijalankan, apabila tidak didukung tenaga bimbingan dan konseling dan pengetahuan/kompetensi yang memadai dari ahli yang bertugas melaksanakannya, sedangkan satu sisi pihak sekolah menghadapi kendala minornya tenaga bimbingan dan konseling dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki mereka. Mengingat bimbingan bukanlah "obat mujarab" bagi segala masalah pendidikan. Mereka mempunyai keterbatasan ruang gerak dan waktu serta tenaga.

Membimbing siswa untuk sampai ke tempat tujuan tidak sesudah menyampaikan teori pelajaran, didalamnya terdapat sejumlah unsur dan aspek yang memerlukan perjalanan panjang dan cukup melelahkan, karena pembimbing di sini berhadapan dengan manusia yang memiliki

pengumpulan data, pengolahan data, diagnosa, prognosa, treatment dan evaluasi (follow-up).

Disamping langkah tersebut setiap sekolah memiliki kebijakan yang harus diperhatikan oleh siswa-orang tua-guru dan semua pihak yang terlibat kebijakan itu adalah : "pertama anak dipanggil menghadap bimbingan dan konseling (maksimal 3 kali), kedua; orang tua diberi surat panggilan ke sekolah atau pihak sekolah bertandang ke rumah, ketiga atau keputusan akhir anak dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dan tidak menutup kemungkinan petugas bimbingan dan konseling meminta bantuan tokoh/ahli agama untuk memberikan terapi religius."

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor (guru pembimbing) dalam melaksanakan layanan bimbingan, demi terciptanya kondisi konseling yang fair dan familiar maka pembimbing pun harus mengerahkan usahanya untuk membentuk suasana enjoy sedemikian rupa, sehingga tidak ada kesan negatif selama proses layanan berlangsung. Klien (siswa bermasalah) akan merasa damai dan aman mengeluarkan keluhan dan sebab-sebab yang membelenggunya, begitu juga dengan konselor, sikap empaty dan bijaksana harus senantiasa ditegakkan agar peluang besar untuk berhasil diraihinya.

2. Syarat sifat dan sikap: supel, ramah/lemah lembut, dan fleksibel sehingga mudah menyesuaikan diri dan mudah dipercayai mempunyai taraf kebijaksanaan yang tinggi, menghargai tuntutan-tuntutan etis dari jabatannya (kode etik jabatan)
3. Syarat stabilitas psikis; menunjukkan kematangan dalam pribadinya dan kedewasaan dalam tindakannya.

Persyaratan tersebut tidaklah mudah dipenuhi dan didapatkan, sebagaimana yang dalam dunia nyata (lokasi penelitian) sebagai konsekwensinya program bimbingan tidak bisa terealisasi dengan baik dan optimal. Konkretnya, banyak kerikil menghadang / hambatan-hambatan pelaksanaan bimbingan di sekolah sebagaimana kenyataan yang ada pada tiga SLTP area observasi penulis :

1. Minimnya tenaga ahli bimbingan yang tidak sinkron antara jumlah pelajar / siswa dengan guru pembimbing, akibatnya program layanan bimbingan tidak berfungsi sepenuhnya dan termanifestasi sebagaimana mestinya.
2. Para lulusan kurang berbekal praktek bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga ketika mereka terjun di sekolah masih bingung apa yang harus mereka kerjakan.
3. Banyak petugas bimbingan tidak dari lulusan program studi psikologi pendidikan dan bimbingan, sebagai akibat program bimbingan tidak dapat berjalan dengan baik dan kesan para guru dan staf sekolah, siswa serta orang tua semakin berkurang.
4. Para guru melepaskan diri dari fungsi pendidikan, karena dipandang sudah ada staf bimbingan. Ia datang hanya untuk mengajar, dmapaknya program bimbingan kurang mendapat dukungan dari para guru.
5. Tidak / belum tersedianya sarana dan prasarana (fasilitas) bimbingan dan konseling secara lengkap, sehingga layanan bimbingan tidak lancar dan kurang memadai.

Beberapa hambatan yang penulis temui di lapangan, dan masih banyak lagi. Sedangkan tantangan dan kesulitan lain yang diuraikan W.S. Winkel dalam bukunya "Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan" dikelompokkan dalam kategori-kategori sebagai berikut :

1. Diri konselor sendiri. Banyak tamatan program studi bimbingan dan konseling masih berusia muda pada saat terjun ke lapangan, kepribadian belum terbentuk sepenuhnya, sehingga konselor menjadi ragu-ragu mendekati siswa, kurang berwibawa di mata siswa, mudah terbawa hanyut oleh jumlah dan variasi masalah yang harus dihadapi, dan kurang mendapat kepercayaan dari guru-guru yang sudah berpengalaman.
2. Pimpinan sekolah. Pada umumnya kepala-kepala sekolah menunjukkan sikap positif terhadap bimbingan dan konseling, tetapi belum tentu mereka sungguh-sungguh mengerti hakikat dari pelayanan bimbingan.
3. Staf guru. Berbagai sikap dan tanggapan yang diberikan guru yang dilontarkan kepada mereka dari penilaian positif sampai negatif sekalipun sehingga mereka menjadi berkecil hati.
4. Para siswa. Dalam kalangan siswa persepsi-persepsi begitu bervariasi, dari tanggapan yang positif sampai sikap kurang peduli,

Perpaduan antara data riil dengan paparan W.S. Winkel, menurut analisa penulis merupakan persoalan yang penting untuk segera disikapi demi terwujudnya pelaksanaan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien sebagaimana ketentuan. Ternyata hambatan-hambatan yang dihadapi petugas bimbingan dan konseling begitu kompleks, secara singkat dapat penulis simpulkan bahwa hambatan dan kesulitan yang kerap terjadi bermuara dari berbagai faktor, sehingga sifatnya komprehensif, diantaranya : karena minusnya tenaga konselor sekolah (kurang siapnya pribadi konselor), masih banyak konselor sekolah yang berusia relatif mudah dan kurang berpengalaman serta tidak sesuai dengan profesinya (bukan tamatan bidang keilmuan yang berbau psikologi/bimbingan dan konseling), kelengkapan fasilitas bimbingan dan konseling yang dirasa jauh dari taraf yang ditentukan, sikap dan tanggapan dari berbagai pihak (guru, pimpinan sekolah, orang tua dan siswa serta personil lain) dan kondisi pendidikan yang kurang mendukung.

Dari berbagai hambatan tersebut, mungkinkah program layanan bimbingan dan konseling dapat beroperasi secara keseluruhan dan baik. Sementara problem yang dihadapi begitu banyak dan berat. Untuk memfollow-up permasalahan diatas, pihak sekolah hendaknya

